

**EVALUASI KINERJA KEUANGAN KANTOR BERSAMA
SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP
(SAMSAT) MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA**

**Diajukan Oleh
Sry Handayani Rahman
4518012147**



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Evaluasi Kinerja Keuangan Kantor Bersama
Samsat Kabupaten Luwu Utara

Nama Mahasiswa : Sry Handayani Rahman

Stambuk/NIM : 4518012147

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Program Studi : Manajemen

Pembimbing I

Pembimbing II

Telah Disetujui:

UNIVERSITAS

BOSOWA

Dr. Thamrin Abduh, SE., M.Si

Rafiuddin, SE., M.Si

Mengetahui dan Mengesahkan :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi

Universitas Bosowa

Manajemen

Dr.Hj. Herminawaty Abu Bakar, S.E., M.Si

Ahmad Jumarding, S.E., M.M

Tanggal Pengesahan:

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sry Handayani Rahman
NIM : 4518012147
Jurusan : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul : Evaluasi Kinerja Keuangan Kantor Bersama Samsat Kabupaten
Luwu Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan dapat tanpa paksa sama sekali.

Makassar, 20 Juli 2022

Mahasiswa yang bersangkutan

Sry Handayani Rahman

EVALUASI KINERJA KEUANGAN KANTOR BERSAMA SAMSAT MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA

Oleh:

Sry Handayani Rahman

Email : sryhandayani147@gmail.com

Pembimbing 1 :

Dr. Thamrin Abduh, SE., M.Si

Email : thamrinabduh64@gmail.com

Pembimbing 2 :

Rafiuddin, SE., M.Si

Email : rafiuddinbosowa@gmail.com

Program Studi Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa

ABSTRAK

Sry Handayani Rahman. 2022. Skripsi. Evaluasi Kinerja Keuangan Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara dibimbing oleh Dr. Thamrin Abduh, SE., M.Si dan Rafiuddin, SE., M.Si.

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pengelolaan kinerja keuangan Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, metode penelitian lapangan (*field research*), dan metode penelitian kepustakaan (*Library research*). Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data hingga pada penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja keuangan pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara telah sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah walaupun pengelolaannya terbilang singkat karena diteruskan ke Kasda Provinsi Sulsel. Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara sudah berjalan dengan baik dalam hal ini dapat dilihat dengan akuntabilitas yang diterapkan dan dilihat pada pertanggungjawaban kerja pegawai dalam bentuk laporan serta dilakukannya pengevaluasian ataupun audit oleh pusat sebagai bukti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Pengelolaan Kinerja Keuangan pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara transparansinya belum terbuka untuk masyarakat umum, meskipun demikian transparansi informasi sudah dilakukan dengan baik.

Kata Kunci : kinerja keuangan

**EVALUATION OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF KANTOR BERSAMA
SAMSAT MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA**

By :

Sry Handayani Rahman

Email: sryhandayani147@gmail.com

Pembimbing 1 :

Dr. Thamrin Abduh, SE., M.Si

Email : thamrinabduh64@gmail.com

Pembimbing 2 :

Rafiuddin, SE., M.Si

Email : rafiuddinbosowa@gmail.com

Management Study Program

Faculty of Economics and Business

Bosowa University

ABSTRACT

Sry Handayani Rahman. 2022. Skripsi. Evaluation of the Financial Performance of the Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara guided by Dr. ThamrinAbduh, SE., M.Si and Rafiuddin, SE. M.Si

This study aims to determine the evaluation of the management of the financial performance of the Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara.

The type of research used is descriptive qualitative with data collection methods in the form of interviews, field research methods (field research), and library research methods. The data analysis method used is data reduction, data presentation to drawing conclusions and verification.

The results of this study indicate that the management of financial performance at the Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Financial Management, although the management is relatively short, because it is forwarded to the treasury of the Province of South Sulawesi. The joint office of Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara has been running well, in this case it can be seen with the accountability that is applied and can be seen in the accountability of the work of employees in the form of reports and evaluations or audits by the center as evidence of financial statements managements accountability. Financial Performance Management at the Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara has not been transparent to the public at large, but information transparency has been carried out well.

Keywords : *financial performance*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala berkat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa penulis kirimkan shalawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan kerabat lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Bosoa Makassar. Adapun judul penulisan skripsi ini adalah **“Evaluasi Kinerja Keuangan Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara.”**

Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang turut membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, dan saya juga mohon maaf yang sebesar- besarnya apabila ada kesalahan dalam penyusunan penulisan skripsi ini, baik susunan maupun hasil materi yang saya peroleh, karena pengalaman dan pengetahuan penulis yang terbatas. Sebab itu dengan segala keterbatasan serta kemampuan yang dimiliki, penulis berusaha menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan semaksimal mungkin dengan kesadaran bahwa penulis hanya manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan sehingga bisa dimaklumi atas segala kekurangan tersebut.

Untuk itu terimakasih dan penghargaan serta apresiasi yang luar biasa atas segala bantuan dan semangat yang tanpa henti, dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis diberi bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara

materi maupun moril. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada, penulis tujukan kepada:

1. Teristimewa dan terutama kepada kedua orang tua penulis, yang telah berperan penting dalam kehidupan psikologis dan juga sosiologis penulis, atas segala pengorbanan, doa, dan kasih sayang yang tidak pernah putus diberikan untuk penulis sehingga penulisan skripsi ini bisa tersusun dengan baik dan sejalan dengan akal sehat. Dan Gunawan Rahman, Adyaksa Rahman, serta Arsyad Nufail Rahman selaku saudara penulis yang juga berperan penting dalam kehidupan psikologis dan juga sosiologis penulis.
2. Ucapan terima kasih penulis diberikan kepada Rektor Universitas Bosowa Makassar Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya. S.T.,M.Si
3. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abu Bakar, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi,
4. Ibu Indrayani Nur, S.Pd., SE., M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi,
5. Ahmad Jumarding, S.E.,M.M selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
6. Dr. Thamrin Abduh, SE.,M.Si selaku pembimbing I dan Rafiuddin, SE.,M.Si selaku pembimbing II atas bimbingan dan arahan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini, serta telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.

7. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis dapat bertambah. Beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan administrasi.
8. Ibu Enny Abadi Joko, S.E selaku Kepala UPT Pendapatan Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara beserta staff dan pegawai atas pemberian izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara.
9. Terkhusus buat Pasmon circle yang ada mulai tahun 2018, Boy, Komang, Dewi, Hainun, Henny, Warda, dan Steff, yang selalu saling support satu sama lain.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2018 yang selalu mengisi hari-hari perkuliahan menjadi sangat menyenangkan.
11. Seluruh pegawai dan staff Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa atas segala bantuannya.
12. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dibalas dengan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Sebagaimana pepatah mengatakan bahwa “Tak ada gading yang tak retak”, penulis sadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan bukan ditangan mahasiswa atau siapa saja, melainkan milik Yang Maha Sempurna. Oleh karena itu, dengan segala

keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar laporan ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi setiap yang membacanya. Semoga ini dapat bermanfaat, dan semoga Tuhan selalu melimpahkan hidayah, rahmat dan karunia-Nya, Amiin.

Sry Handayani Rahman



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Kerangka Teori.....	5
2.1.1. Pengertian Manajemen Keuangan.....	5
2.1.2. Sistem Administrasi Satu Atap	5

2.1.3. Tujuan Manajemen Keuangan	6
2.1.4. Fungsi Manajemen Keuangan.....	7
2.1.5. Prinsip-Prinsip Manajemen keuangan.....	8
2.1.6. Kinerja Keuangan.....	10
2.1.7. Laporan Keuangan	11
2.1.8. Analisa Laporan Keuangan	13
2.1.9. Pengertian Kinerja.....	14
2.1.10. Indikator Kinerja	15
2.1.11. Ukuran Kinerja.....	17
2.1.12. Evaluasi Dan Penilaian Kinerja	18
2.2. Kerangka Pikir	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	20
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	20
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	20
3.3. Informan Penelitian.....	21
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	21
3.5. Metode Analisis	22
3.6. Definisi Operasional Variabel.....	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	25
4.1. Gambaran Umum Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara.....	25
4.1.1. Sejarah Berdirinya Samsat Di Indonesia.....	25

4.1.2. Visi Misi Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara.....	29
4.1.3. Struktur Organisasi Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara	31
4.1.4. Job Description Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara	33
4.1.5. Sumber Daya Manusia Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara	41
4.2. Deskripsi Data	42
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
5.1. Kesimpulan.....	62
5.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	66

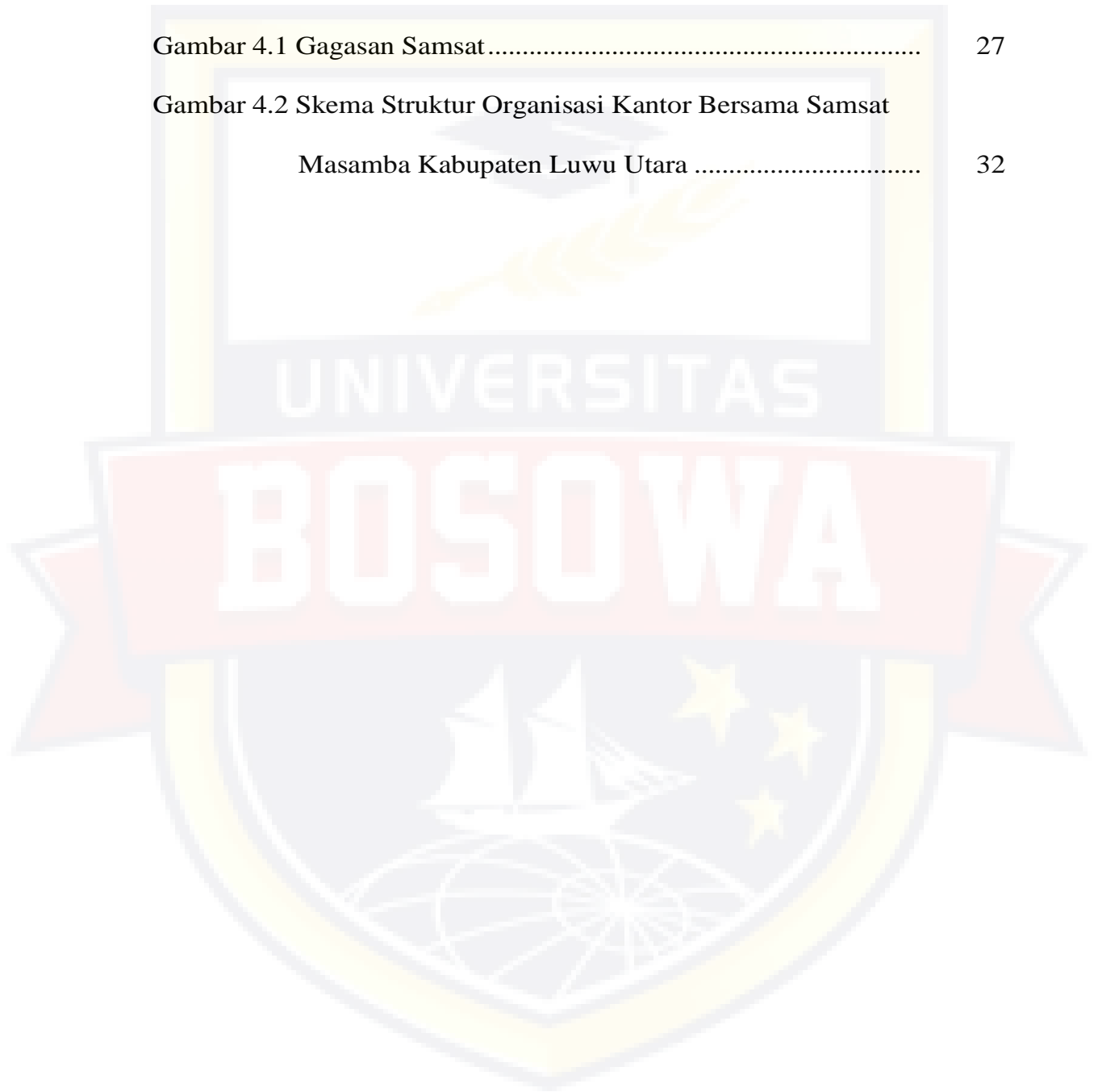
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Unsur Informan.....	20
Tabel 4.1 Data Pegawai Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	18
Gambar 4.1 Gagasan Samsat.....	27
Gambar 4.2 Skema Struktur Organisasi Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara	32



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah merupakan suatu lembaga organisasi yang memiliki kekuasaan untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingan suatu bangsa dan negara. Oleh sebab itu tujuan utama dari pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pelayanan tersebut di masa yang akan datang. Meningkatnya dari pelayanan tersebut akan membuat maju suatu negara.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dituntut dengan efisien dan efektif karena pemerintah memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonominya (Indah Lestari, 2017). Maju dan berkembangnya suatu negara dapat dilihat dari tingginya pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Faktor investasi, angkatan kerja, inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan beberapa faktor lainnya, dapat mempengaruhi suatu negara atau wilayah.

Kinerja suatu lembaga pemerintah ataupun perusahaan merupakan hasil dari rangkaian aktivitas yang di lakukan dalam kurung waktu tertentu. Salah satu sumber informasi untuk mengetahui dan mengukur kinerja perusahaan atau lembaga pemerintahan adalah laporan keuangan, dimana dengan laporan keuangan yang baik akan menyajikan laporan keuangannya secara transparan dan tidak terdapat keganjilan dalam penyajiannya.

Masyarakat saat ini memiliki tuntutan terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah termasuk dalam hal pengelolaan keuangan haruslah akuntabel. Sesuai dengan PP No 12 tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana hal ini untuk menghindari adanya penyimpangan keuangan baik itu pembororsan maupun efisiensi penggunaan dana yang apabila dengan tidak adanya pengelolaan keuangan yang baik akan mampu memberikan celah pada tindak pidana korupsi.

Untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dibutuhkan penguatan sistem seperti analisa, sistem akuntabiliats, sistem transparan, dan pengevaluasian terhadap laporan keuangan dengan menggunakan teknik analisis. Salah satu teknik yang dipakai untuk mengetahui kondisi keuangan dalam hal kinerja keuangan suatu instansi adalah laporan keuangan yang disusun pada setiap akhir periode yang berisi pertanggungjawaban dalam bidang keuangan atas berjalannya suatu usaha. Adapun untuk mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas dapat dilakukan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban untuk memenuhi prinsip pada pengelolaan keuangan yang baik.

Analisis laporan keuangan tujuannya adalah untuk menilai keadaan keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinan di masa yang akan datang. Nilai yang tercantum dalam laporan keuangan selalu berubah-ubah setiap periodenya, atau selalu mengalami penambahan dan pengurangan. Perubahan nilai yang ada dalam laporan keuangan akan berpengaruh didalam mengambil keputusan. Oleh karena itu laporan keuangan sangat berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan misalnya pemilik perusahaan, pemasok, investor, pegawai, dan pemerintah (pajak).

Adapun yang terjadi pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara yaitu tidak serta merta terbuka kepada masyarakat umum terkait

dalam hal kinerja pengelolaan keuangan tentunya hal ini dikarenakan oleh adanya prosedur dan kurangnya akses media sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui pengelolaan kinerja keuangan dan akhirnya akan menimbulkan rasa kurang percaya masyarakat kepada pemerintah.

Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah maka penulis melakukan penelitian terkait kinerja keuangan. Kinerja keuangan pemerintah menjadi poin penting dan hal yang menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan, dengan meneliti kinerja keuangan dapat diketahui hasil dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, apakah pemerintah sudah efektif dan optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang didelegasikan oleh rakyatnya untuk mensejahterakan. Manajemen keuangan merupakan salah satu kunci dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Adapun satuan kerja pengelola keuangan daerah yang melakukan pemungutan pajak provinsi dan badan usaha yang berada dalam satu kesatuan yaitu Kantor Bersama Samsat. Hal ini berkaitan dengan analisis terhadap kinerja keuangan di Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara yang menjadi sumber informasi yang penting untuk membuat segala kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka peneliti untuk memilih judul penelitian “Evaluasi Kinerja Keuangan Kantor Samsat Masamba Luwu Utara”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja keuangan

Kantor Samsat Kabupaten Luwu Utara berdasarkan pengelolaan keuangan dari Laporan Keuangan Kantor Samsat Masamba Luwu Utara’?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi kinerja keuangan yang telah dilakukan Kantor Samsat Kabupaten Luwu Utara berdasarkan pengelolaan keuangan dari Laporan Keuangan Kantor Samsat Masamba Luwu Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu:

1. Bagi penulis sebagai wahana penerapan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.
2. Bagi Instansi dapat membantu manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Bagi pihak lain dapat menjadi masukan baru dan referensi khususnya bagi rekan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan juga yang membutuhkan suatu informasi.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Pengertian Manajemen Keuangan

Menurut Haris Nurdiansyah dan Robbi Saepul Rahman (2019), manajemen adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditargetkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Menurut Hadija Febriana dkk (2019), keuangan yang akurat dapat dijadikan sumber informasi bagi pihak yang membutuhkan gambaran mengenai kondisi yang nyata dan pencapaian yang diraih oleh suatu perusahaan/instansi yang dibuktikan dengan keadaan keuangan pada periode tertentu, serta berperan penting dalam konsekuensi pengambilan keputusan dengan fokus pada penciptaan kesejahteraan.

Jadi manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemberian panduan atau petunjuk pelaksanaan yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan pada suatu aktivitas keuangan. Manajer merupakan pelaksana dari kegiatan manajemen karena ruang lingkup pembahasan hanya berfokus kepada manajemen keuangan. Jadi sebagai pelaksana dibidang keuangan adalah manajer keuangan. Agus Zainul Arifin (2018) mendefinisikan manajemen keuangan sebagai tugas pokok dari manajer keuangan.

2.1.2. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015, Samsat atau Sistem Administrasi Satu Atap merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regiden Ranmor), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLI) dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat. Penyelenggaraan samsat yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya bagian lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melakukan pemungutan pajak Provinsi dan Badan Usaha yang berada dalam satu kesatuan yaitu Kantor Bersama Samsat.

2.1.3. Tujuan Manajemen Keuangan

Tujuan utama manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

Menurut Musthafa (2017) tujuan manajemen keuangan, yaitu:

1. Pendekatan keuntungan dan rasio

Manajer keuangan harus menciptakan keuntungan atau laba yang maksimal dengan tingkat resiko yang minimal.

- a. Laba yang maksimal maksudnya adalah agar perusahaan memperoleh laba yang besar, sesuai dengan tujuan perusahaan.
- b. Risiko yang minimal, maksudnya adalah agar biaya operasional perusahaan diusahakan sekecil mungkin dengan jalan efisiensi.
- c. Untuk memperoleh laba yang maksimal dengan risiko yang minimal dilakukan dengan pengawasan aliran dana. Maksudnya adalah dengan melakukan pengawasan terhadap setiap dana yang masuk maupun dana yang keluar, agar perusahaan dapat merencanakan kegiatan berikutnya

disamping untuk menghindari terjadinya penyimpangan dana.

- d. Menjaga fleksibilitas usaha. Maksudnya adalah agar manajer keuangan selalu berusaha menjaga maju mundurnya perusahaan.

2. Pendekatan Likuiditas Profitabilitas

- a. Menjaga likuiditas dan profitabilitas.
- b. Likuiditas berarti manajer keuangan menjaga agar selalu tersedia uang kas untuk memenuhi kewajiban finansialnya dengan segera.
- c. Profitabilitas berarti manajer keuangan berusaha agar memperoleh laba perusahaan, terutama untuk jangka panjang.

2.1.4. Fungsi Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan dalam suatu perusahaan sangat berperan penting dalam menjalankan fungsinya diberbagai kegiatan keuangan. Berikut adalah fungsi-fungsi dari manajemen keuangan (Anik Yuesti, 2019).

1. Perencanaan Keuangan

Manajemen keuangan berfungsi untuk membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu.

2. Penganggaran Keuangan

Manajemen keuangan berfungsi menjadi tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan.

3. Pengelolaan Keuangan

Dengan adanya manajemen keuangan maka perusahaan dapat menggunakan dana untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.

4. Pencarian Dana

Dalam hal ini, manajemen keuangan berfungsi mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan.

5. Penyimpanan Dana

Manajemen keuangan berfungsi mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman.

6. Pengendalian Keuangan

Dalam hal ini manajemen keuangan berfungsi untuk melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan.

7. Pemeriksaan Keuangan

Manajemen keuangan berfungsi untuk melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.

2.1.5. Prinsip – Prinsip Manajemen Keuangan

(Anik Yuesti, 2019) Ada tujuh prinsip di dalam manajemen keuangan yaitu:

1. Konsistensi (*Consistency*)

Sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi. Pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen keuangan merupakan suatu tanda bahwa manipulasi di pengelolaan keuangan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok atau organisasi. Organisasi harus dapat menjelaskan

bagaimana dia menggunakan sumber dayanya dan apa yang telah dia capai sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat.

3. *Transparansi (Transparancy)*

Organisasi harus terbuka berkenaan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan. Termasuk didalamnya menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu serta dapat dengan mudah dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Apabila organisasi tidak transparan, hal ini mengindikasikan ada sesuatu hal yang disembunyikan.

4. *Kelangsungan Hidup (Viability)*

Agar keuangan terjaga pengeluaran organisasi ditingkat stratejik maupun operasional harus sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Kelangsungan hidup (*viability*) merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi.

5. *Integritas (Integrity)*

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan harus tetap dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan.

6. *Pengelolaan (Stewardship)*

Organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

7. Standar Akuntansi (*Accounting Standards*)

Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku secara umum.

2.1.6. Kinerja Keuangan

Fahmi (2012 : 2) yang dikutip oleh Marsel Pongoh (2013) menyatakan kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standart dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General Aceptep Accounting Priciple), dan lainnya.

Menurut Prastowo yang dikutip oleh Marsel Pongoh (2013) menyebutkan unsur dari kenerja keuangan perusahaan adalah unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran kinerja perusahaan yang disajikan pada laporan laba rugi, penghasilan bersih seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagian dasar bagi ukuran lainnya.

Menurut Fidhayatin (2012:205) yang dikutip oleh Marsel Pongoh (2013) “perusahaan yang sehat nantinya akan dapat memberikan laba bagipara pemilik modal, perusahaan yang sehat juga dapat membayar hutang dengan tepat waktu”. Selain itu, kinerja keaunagan dari suatu perusahaan yang telah dicapai dalam satu

tahun atau satu periode waktu, adalah gambaran sehat atau tidaknya keadaan suatu perusahaan.

2.1.7. Laporan Keuangan

Diana Widhi Rachmawati (2017), Laporan keuangan dibuat dengan maksud memberikan gambaran atas laporan keuangan secara tertata yang dilakukan manajemen suatu instansi, dimana laporan keuangan itu bersifat menyeluruh. Dengan mengadakan analisa terhadap pos-pos neraca akan dapat diketahui gambaran tentang posisi keuangan, sedangkan analisa terhadap laporan laba ruginya akan dapat melihat perkembangan kinerja perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut perlu adanya laporan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan, dimana hasil dari analisa laporan keuangan tersebut merupakan dasar bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan.

Menurut Darmawan (2020), ada tiga kelompok yang paling berkepentingan dengan rasio-rasio keuangan, yaitu para pemegang saham dan calon pemegang saham, kreditur dan calon kreditur serta manajemen perusahaan. Para pemegang saham dan calon pemegang saham menaruh perhatian utama pada tingkat keuangan, baik yang sekarang maupun kemungkinan tingkat keuntungan pada masa yang akan datang. Hal ini sangat penting bagi para pemegang dan calon pemegang saham karena tingkat keuntungan akan mempengaruhi harga saham-saham yang mereka miliki. Para Kreditur pada umumnya merasa kepentingan terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajiban finansial baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kreditur yang

pada saat ini sudah memberikan pinjaman kepada perusahaan ingin mendapatkan suatu jaminan bahwa perusahaan tempat mereka menanamkan modalnya akan mampu membayar bunga dan pinjaman pokok tepat pada waktunya. Sedangkan calon kreditur lebih menekankan pada struktur finansial dan struktur modal perusahaan.

Kelompok ketiga yang juga berkepentingan dengan rasio finansial ini adalah manajemen perusahaan sendiri. Manajemen perusahaan menyadari hal-hal tersebutlah yang akan dinilai oleh pemilik perusahaan atau para kreditur. Jadi sudah tentu dalam hal ini manajemen perusahaan akan selalu berusaha akan mempertahankan rasio-rasio yang dianggap baik oleh kedua kelompok di atas.

Dalam laporan keuangan disajikan dengan meliputi tiga hal utama, yaitu :

a. Laporan rugi laba (*Income Statement*)

Laporan rugi/laba merupakan upaya untuk mengukur hasil bersih yang dihasilkan selama waktu tertentu, bisa selama satu bulan, enam bulan atau setahun. Laporan rugi/laba tidak bersifat tunai atau seketika (*cash basis*) melainkan bersifat akumulatif (*accrual*).

b. Neraca (*Balance Sheet*)

Neraca merupakan sebuah laporan mengenai posisi keuangan perusahaan pada saat itu atau periode tertentu meliputi kepemilikan aktiva (*asset*), hutang (*Long Term & Short Term*) dan modal pemilik (*Equity*). Aktiva adalah semua harta/kekayaan yang dimiliki perusahaan sedangkan hutang modal sumber-sumber pembiayaan atau pengadaan aktiva te

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan pencatatan kas masuk dan kas keluar dari suatu perusahaan yang menggunakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari neraca dan laporan rugi/laba.

2.1.8. Analisa Laporan Keuangan

Tujuan utama analisa laporan keuangan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan perusahaan, agar dapat menentukan langkah strategi yang tepat serta upaya perbaikan di masa depan. Darmawan (2020) berpendapat bahwa analisa laporan keuangan perusahaan pada dasarnya merupakan perhitungan untuk menilai keadaan keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini dan kemungkinan di masa depan. Kemudian Bambang Riyanto dalam Jeni Irnawati, dkk (2021) dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen Keuangan menyatakan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan finansial suatu perusahaan perlulah kita mengadakan pemahaman analisa terhadap data finansial dari perusahaan yang bersangkutan, dimana laporan keuangan tersebut memberikan ringkasan mengenai keadaan finansial suatu perusahaan dimana neraca (*Balance Sheet*) mencerminkan nilai aktiva, hutang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu dan laporan laba/rugi (*Income Statement*) mencerminkan hasil-hasil yang dicapai dalam suatu periode tertentu biasanya meliputi periode satu tahun.

Mengadakan intrerpretasi analisa terhadap laporan keuangan dari suatu perusahaan akan sangat bermanfaat bagi penganalisa untuk dapat mengetahui keadaan dan perkembangan (kinerja) keuangan perusahaan yang bersangkutan. Pimpinan perusahaan atau manajer sangat berkepentingan laporan keuangan dari perusahaan yang dipimpinnya.

Adapun menurut Toto Prihadi (2019) mengenai analisa laporan keuangan menjelaskan bahwa analisis laporan keuangan pada umumnya berasal dari asset atas keuangan yang diciptakan untuk mengetahui kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang sifatnya relatif pada suatu perusahaan sebagai pembandingan terhadap perusahaan lain sejenis dan untuk menunjukkan apakah posisi perusahaan telah mengalami perbaikan atau penurunan selama tahun-tahun yang telah berjalan.

2.1.9. Pengertian Kinerja

Indra Bastian dalam Dian Annisa (2011), “kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program /kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu”.

Adapun beberapa pendapat dari Wikipedia antara lain :

- 1) Anwar Prabu Mangkunegara “kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.
- 2) Barry Cushway “kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan”.
- 3) Veizal Rifai, mengemukakan kinerja, yaitu “merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan”.

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan, kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu

untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

2.1.10. Indikator Kinerja

Indra Bastian dalam Dian Annisa (2011), indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts), dimana Indra Bastian menjelaskan :

- a. Indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.
- b. Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik.
- c. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
- d. Indikator manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- e. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja menurut Indra Bastian dalam Dian Annisa (2011) adalah :

- a) Spesifik, jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
- b) Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama.
- c) Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek objektif yang relevan.
- d) Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, serta dampak.
- e) Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
- f) Efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Apa yang diungkapkan Indra Bastian diatas, sejalan dengan pendapat A. Irfandi (2018) bahwa, “istilah indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja”. Yang mana, adapun peran indikator kinerja bagi pemerintah menurut beliau :

- a. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi.
- b. Untuk mengevaluasi target akhir (final outcome) yang dihasilkan.
- c. Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial.
- d. Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan.

- e. Untuk menunjukkan standar kinerja.
- f. Untuk menunjukkan efektivitas.
- g. Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran.
- h. Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya.

2.1.11. Ukuran Kinerja

Dian Annisa (2011), untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja suatu organisasi perlu dilakukan adanya pengukuran seluruh aktivitas yang dilakukan dalam organisasi tersebut.

Penilaian kinerja (*performance appraisal*) pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja suatu instansi tersebut.

Menurut Robert L dalam Andri Prasetyo (2010), ukuran kinerja dalam kantor samsat atau kantor pendapatan pajak kendaraan bermotor dapat dilihat dan diukur berdasarkan pendapatan pajak kendaraan bermotor, dimana pendapatan yang diperoleh melebihi target yang sudah ditentukan dari pemerintah pusat sesuai dan mencapai target, maka menunjukkan bahwa kinerja pada kantor tersebut menunjukkan kinerja yang baik, begitupun sebaliknya apabila pendapatan

tidak sesuai target maka kinerja pada kantor Samsat menunjukkan kinerja yang kurang baik.

2.1.12. Evaluasi Dan Penilaian Kinerja

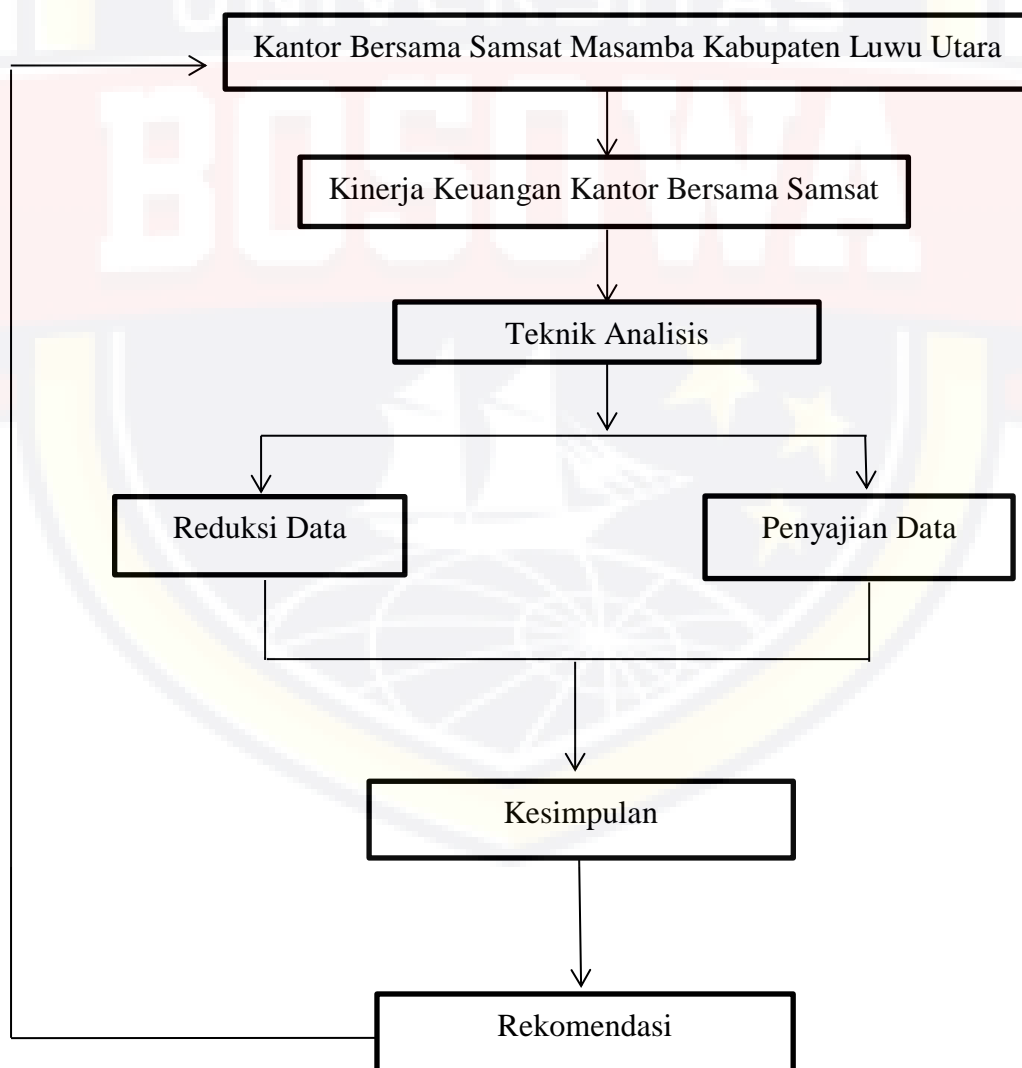
Evaluasi keuangan merupakan salah satu tujuan dari pembuatan laporan keuangan sehingga evaluasi keuangan sangat tepat jika dilakukan di akhir tahun. Dimana bulan Desember adalah pertanda akhir tahun. Dalam dunia bisnis terutama bagian akuntansi dan keuangan, akhir tahun merupakan hari-hari yang sibuk dan melelahkan. Para pelaku usaha dan akuntan harus melakukan banyak hal, seperti tutup buku, membuat dan menyelesaikan laporan akhir tahun, dan tidak kalah penting juga melakukan evaluasi transaksi keuangan.

Siwi Susanti dan Bambang Sugeng Dwiyanto (2016) menyebutkan evaluasi bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan kantor Samsat, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Renstra Bisnis adalah dokumen yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional. Renstra Bisnis dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja. RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran. Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan menurut Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 Pasal 128 dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam Siwi Susanti dan Bambang Sugeng Dwiyanto (2016) yaitu:

1. Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas).
2. Memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas).
3. Memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas).
4. Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

2.2. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian dapat dijelaskan kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada kantor Samsat Masamba Luwu Utara, di Jalan Poros Masamba, Luwu, Sulawesi Selatan, 92961. Adapun waktu penelitian akan dihitung sejak dilaksanakannya seminar dan dinyatakan lulus serta telah mendapatkan rekomendasi penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara (*Interview*)

Menurut Fadhallah (2020) wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee* dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data, dimana *interviewer* menanyakan sejumlah pertanyaan kepada *interviewee* untuk mendapatkan jawaban.

2. Metode penelitian lapangan (*Field Research*)

Metode ini melakukan penelitian langsung pada objek penelitian dalam hal ini Kantor Samsat Masamba Luwu Utara, seperti pengumpulan data dengan menggunakan dokumen dan data laporan keuangan kantor Samsat.

3. Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dengan mengambil data dari buku-buku, makalah, jurnal, dan website atau situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

3.3. Informan Penelitian

Adapun informan atau responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

TABEL 3.1
UNSUR INFORMAN

No	Unsur Informan
1	Kepala UPT Pendapatan
2	Kasubbag Tata Usaha
3	Pengawas Pelaporan Transaksi Keuangan

Pada penelitian deskriptif kualitatif, informan penelitian ada dua jenis yaitu informan kunci (*key informan*) dan informan sekunder (*secondary informan*). Dimana informan kunci adalah orang yang dianggap menguasai objek penelitian, sedangkan informan sekunder adalah orang yang tidak mengetahui sepenuhnya terhadap objek penelitian akan tetapi dapat melengkapi informasi berupa data tentang objek penelitian.

3.4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif yang kemudian dijabarkan secara deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun tipe penelitian ini adalah fenomenologi, yaitu suatu penelitian yang dilakukan melalui pemaparan atas pengalaman dari informan yang didukung dengan data kualitatif, dan peneliti berusaha mengungkapkan suatu fakta tertentu yang kemudian akan memberikan gambaran secara objektif tentang permasalahan yang dihadapi ataupun dialami.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan (*Field Research*) pada instansi Kantor Samsat Masamba Luwu Utara atau instansi yang berhubungan dengan penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang diperoleh dari pihak lain maupun sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5. Metode Analisis

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan atas penjelasan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012) yaitu:

1. Reduksi Data (*Data reduction*)

Reduksi data adalah tindakan memilih dan memilah data yang sesuai dengan objek penelitian melalui rangkuman, memilih data-data pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, mencari tema dan pola serta memuang hal-hal yang dianggap tidak perlu. Dalam hal ini, penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan wawancara yang tidak terstruktur agar informan merasa lebih santai namun sesuai fakta dalam menjawab pertanyaan wawancara

kemudian jawaban dari informan akan penulis pilah dan pilih sesuai dengan kebutuhan.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti kemudian akan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif singkat dengan menjelaskan hubungan masing-masing kategori dan melampirkan dalam sebuah bagan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Selanjutnya kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian masih bersifat sementara sampai ditemukannya data dan bukti yang lebih valid untuk digunakan pada tahap selanjutnya.

Setelah data diperlukan diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan kantor tersebut. Analisis ini dilakukan dengan mendasarkan pada teori-teori yang telah diperoleh dari studi kepustakaan.

3.6. Definisi Operasional

1. Kantor Bersama Samsat merupakan sebuah organisasi yang tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Manajemen keuangan dalam Kantor Bersama Samsat adalah semua kegiatan atau aktivitas dalam mengelola semua yang berkaitan dengan aktivitas finansial mulai dari pengelolaan keuangan, penerimaan (wajib pajak, BBN, dan yang lainnya), pengeluaran hingga kebijakan mengadakan pembiayaan.

3. Kinerja keuangan adalah hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
4. Evaluasi Kinerja Keuangan merupakan suatu hal yang penting untuk melihat kinerja keuangan suatu instansi yang bertujuan untuk memberikan informasi yang tepat dan signifikan kepada pengguna.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara

Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara terletak di Jalan Taman Siswa Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan 92961, tepatnya berada di depan SMAN 8 Luwu Utara. Kantor Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara berada di 51.72 km dari Kota Palopo.

4.1.1. Sejarah Berdirinya SAMSAT di Indonesia

Sebelum tahun 1933, yaitu sebelum belakunya WVO (Weg Verkeer Ordienation) No. 86, STNK dikeluarkan oleh polisi sebagai pelaksana dari hak yang dimiliki Gubernur atau Presiden karena polisi pada waktu itu dibawah pemerintah daerah yang membidangi Keamanan Dalam Negri. Pada tahun 1946.

POLRI keluar dari DEPDAGRI (Departemen Dalam Negri) dan berada langsung dibawah Perdana Menteri dengan tugas dan tanggung jawab yang sama yaitu keamanan dalam negri. Setelah POLRI dikeluarkan dari Departemen dalam Negri, Pelaksanaan penertiban STNK tetap oleh POLRI, dengan pengertian tetap melaksanakan hak yang dimiliki oleh Gubernur atau Presiden dalam mengeluarkan STNK. Keadaan ini disebabkan oleh masa peralihan yang belum sempat dibenahi, karena kesibukan dan revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pada tahun 1951, wewenang POLRI untuk mengeluarkan STNK dipertegas dengan berlakunya Undang – undang Nomor 7 Tahun 1951 L.N. 1951

Nomor 42 tanggal 30 Juni 1951 yang merubah dan menambah UUL tahun 1933 (WVO), Pasal 6 Ayat (2) : Keterangan mengemudi diberikan kepada kepala kepolisian Keresidenan. Pasal 8 Ayat (2) : Nomor dan huruf atas permohonan diberikan kepada Pemilik – pemilik atau Pemegang – pemegang kendaraan bermotor oleh kepala Kepolisian Keresidenan dalam wilayah/kekuasaan setiap kendaraan itu berada.

Dengan demikian, yang dimiliki atas kuasa Undang – undang untuk memberikan SIM dan STNK adalah murni dari POLRI, bukan lagi polisi yang menjalankan hal yang dimiliki oleh Gubernur/Presiden.

Pada periode ini mulai berkembang perasaan kebutuhan untuk mengaitkan administrasi STNK dengan sektor pemasukan uang ke kas Negara, yang sebenarnya ternaksud kepentingan bidang kesejahteraan karena sulit untuk dicari jalan lain, maka dikaitkan dengan pengeluaran STNK yang menjadi bidang dari pada Keamanan Dalam Negri (Security/Yustisiil). Hal ini mulai direalisasikan dengan keluarnya peraturan pemerintah tentang :

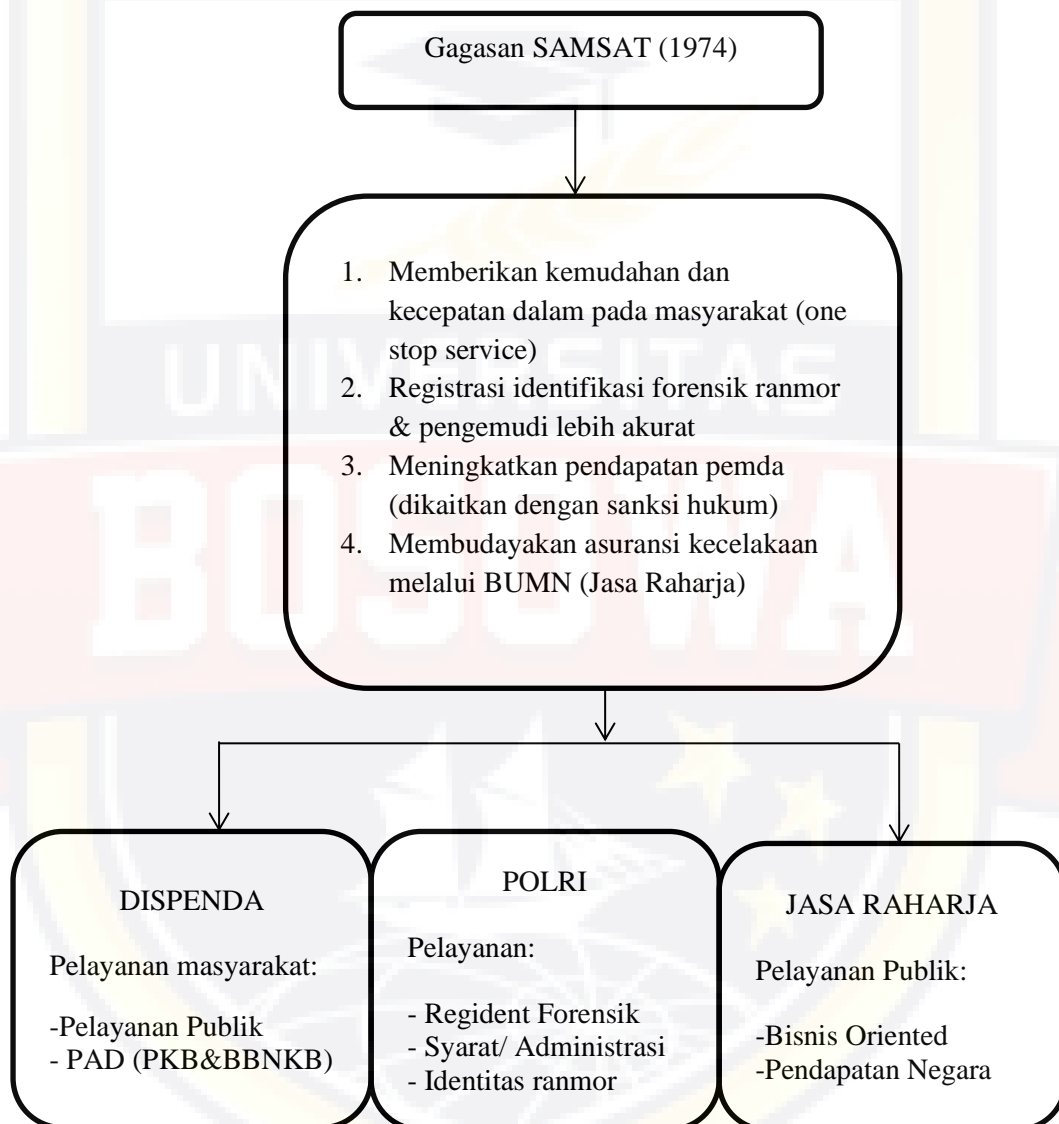
1. Penggantian Undang – undang (Perpu) Nomor 27 Tahun 1959 Pasal 31 ayat (1) mengenai Larangan bagi POLRI untuk mengeluarkan STNK sebelum pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti pelunasan Bea Balik Nama (BBN).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang larangan bagi POLRI mengeluarkan STNK sebelum pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti pembayaran Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas.

3. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 10/EK/IN/ 1966, tanggal 16 September 1966 tentang penginvestasian pemungutan Pajak dalam rangka usaha meningkatkan penerimaan kas negara. Dengan demikian pada periode ini, rintisan kearah pembentukan UPTD SAMSAT telah dimulai

Dengan diberlakukannya Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Nomor 3 tahun 1965 (1 April 1965) maka dicabutlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1961 dimana dalam Undnag-Undang Nomor 3 tahun 1965 tersebut secara tidak jelas mengatur instansi yang berwenang mengeluarkan STNK/SIM akan ditentukan oleh peraturan pemerintah, sedangkan PP itu hingga saat ini belum ada. Walaupun demikian penanggulangan kebutuhan untuk meningkatkan pemasukan negara ini tetap diupayakan bahkan ditingkatkan lagi. POLRI dalam rangka membantu pelaksanaannya telah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan ikut aktif membantu menyelenggarakan razia Pajak Kendaraan Bermotor, membuat STNK dengan sistem komputer, membuat kantor bersama di POLDA Metro Jaya pada tahun 1974, dimana POLRI, PT AK Jasa Raharja dan Dinas pendapatan Daerah bekerja dalam satu kantor untuk memudahkan koordinasi, namun upaya-upaya tersebut belum mendatangkan hasil yang memutuskan terutama di bidang property.

Karena terjadi banyak kendala, maka Pemerintah pada tanggal 29 Desember 1976 menerbitkan surat keputusan bersama Menhakam/Pangab, Menkeu, dan Mendagri NO.Kep/13/XII/1976, Kep 1169/MKIV/76,No.311 Tahun 1976 tentang penyederhanaan pajak kendaraan bermotor yang berkaitan dengan pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Sumbangan Wajib Dana

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dalam suatu Kantor bersama Samsat. Dengan diterbitkan surat keputusan bersama ini diharapkan dapat menciptakan keseragaman pengurusan STNK diseluruh wilayah Indonesia.



Gambar 4.1 Gagasan Samsat

Hakekat pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pemerintahan dan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur

pemerintah sebagai abdi masyarakat. Sesuai dengan SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi azas-azas sebagai berikut:

- a. Transparansi; bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas; dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kondisional; sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berprinsip pada efisiensi dan efektivitas.
- d. Partisipatif; mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan hak; tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- f. Kesederhanaan, dimaksudkan adalah indikator kinerja prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, lancar dan mudah dilakukan.

4.1.2. Visi Misi Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara

Visi dan Misi Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara

a. Visi

“Terwujudnya Pelayanan Prima Demi Kepuasan Masyarakat”

b. Misi

1. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

2. Meningkatkan keamanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah PAD.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya pelayanan kualitas.
6. Mewujudkan aparatur pengolah pendapatan daerah yang cakup, handal, jujur, bertanggung jawab dan profesional dalam kemampuan teknis maupun manajemen.
7. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.

Strategi yang ditempuh Samsat dalam upaya mencapai visi misi di atas adalah:

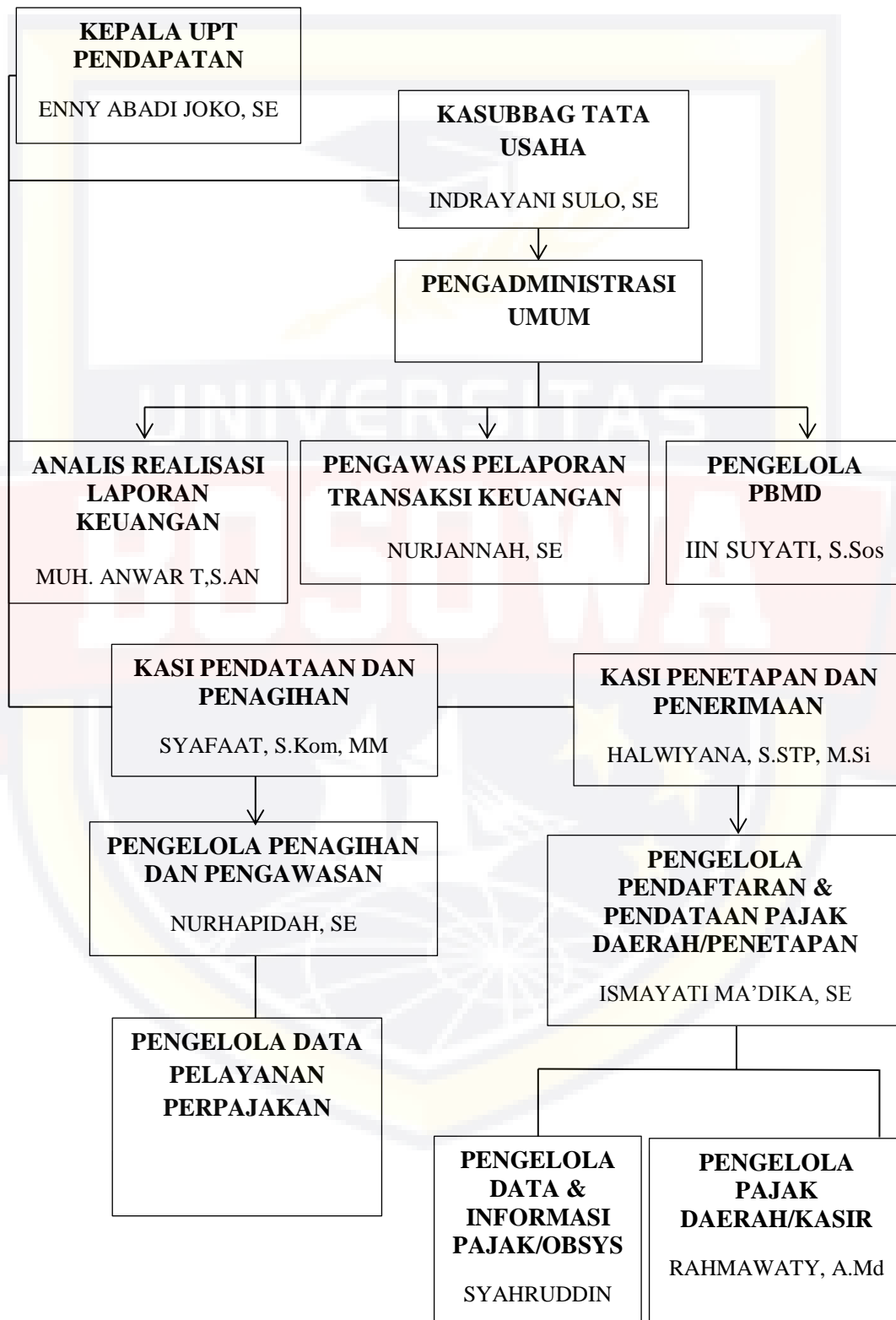
- a) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b) Menyederhanakan sistem dan Prosedur pelayanan.
- c) Memberikan kemudahan, kecepatan, keamanan dan kepastian.
- d) Menerapkan pelayanan prima.
- e) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- f) Mengintegrasikan penerimaan dan melaksanakan pungutan secara efektif dan efisien,
- g) Meningkatkan tertib administrasi, tertib pungutan pelaporan.
- h) Menyosialisasikan setiap proses dan produk kebijakan pungutan.
- i) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

4.1.3. Struktur Organisasi Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara

Dalam menjalankan suatu instansi sebagai suatu sistem dibutuhkan adanya kerjasama antara sub-sub sistem, karena itu perlu adanya pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas dari setiap bagian agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam melaksanakan fungsinya. Struktur organisasi adalah bentuk bagaimana suatu perusahaan diatur dan bagaimana kegiatan tertentu diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk dengan mengatur tugas, tanggung jawab, pengambilan keputusan, alur kerja, saluran komunikasi, dan hierarki. Struktur organisasi juga merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap instansi memiliki struktur organisasi yang berbeda, karena hal ini di pengaruhi oleh tingkat kebutuhan dan tujuan dari instansi yang bersangkutan. Struktur organisasi dapat bermanfaat untuk mengetahui tugas, pekerjaan, dan hubungan antara tugas dan wewenang untuk menjalankan tugas tersebut

Dalam Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara sendiri struktur organisasi menunjukkan pengaturan antara hubungann bagian- bagian dari komponen dan posisi dalam suatu organisasi, pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi fungsi atau kegiatan saling terkait. Adapun berikut struktur organisasi Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut.

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN UPT.PENDAPATAN WILAYAH LUWU UTARA**



4.1.4. Job Description Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu

Utara

Nama dan jabatan pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut.

- a. Enny Abadi Joko, SE (PKT Pembina IV/a, NIP 19750305 2006604 2 003), jabatan Kepala UPT Pendapatan Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara.
- b. Indarayani Sulo, S.E (OKT Penata TK I III/d, NIP 1976064 201164 2 006), jabatan Kasubbag Tata Usaha.

Staff :

1. Muh. Anwar T, S.AN (PKT Penata III/c, NIP 19780526 200701 1 019), jabatan Analis Realisasi Laporan Keuangan.
2. Nurjannah, S.E (PKT Penata TK I III/d, NIP 19770821 200701 2 016), jabatan Pengawas Pelaporan Transaksi Keuangan.
3. Iin Suyati, S.Sos (PKT Penata II/c, NIP 19840512 2 200901 2 001), jabatan Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
4. Syafaat, S.Kom.,MM (PKT Pembina IV/a, NIP 19691003 199403 1 010), jabatan Kasi Pendataan Dan Penagihan.
5. Halwiyanana, S.STP,M.Si (PKT Penata Tk I III/d, NIP 19810626 200112 2 002), jabatan Kasi Penetapan Dan Penerimaan.
6. Nurhapida, S.E (PKT Penata Muda Tk I III/a, 19761230 201406 2 001), jabatan Pengelola Penagihan Dan Pengawasan.

7. Ismayati Ma'Dika, S.E (PKT Penata III/c, NIP 19810621 201001 2 016), jabatan Pengelola Pendaftaran & Pendataan Pajak Daerah/Penetapan.
8. Syahrudin (PKT Penata Tk I II/c, NIP 19760315 200601 1 005), jabatan Pengelola Data Dan Informasi Pajak/OBSYS.
9. Rahmawati (PKT Penata Muda Tk I III/b, NIP 19750922 200701 2 016), jabatan Pengelola Daerah/ Kasir, A.Md

Setiap pemimpin unit organisasi UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya. Pemerintah provinsi Sulawesi selatan dalam hal untuk mengoptimalkan kinerja unit pelaksanaan teknisnya dalam pemungutan pajak, bea cukai, dan yang lainnya, maka pemerintah membagi tugas dan fungsi setiap bagian dari struktur organisasi unit pelaksanaan teknis, yang terdiri dari:

a. Kepala unit pelaksanaan teknis (UPT)

Mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan pelayanan teknis penunjang penerimaan dan pembangunan pajak daerah dan retribusi daerah, yang meliputi :

1. Perencanaan pelayanan teknis penunjang penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Pelaksanaan pelayanan teknis penunjang penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis penunjang penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Pelaksanaan administrasi UPT dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana di maksud meliputi :

- a) Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- d) Menyusun rancangan mengoreksi ,memaraf dan /atau menandatangani naskah dinas.
- e) Mengikuti rapat –rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- f) Merumuskan kebijakan program, keuangan, umum perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPT.
- g) Melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPT.
- h) Melaksanakan perencanaan pelayanan teknis penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- i) Melaksanakan penyiapan teknis penunjang pelayanan penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- j) Melaksanakan pelayanan penerimaan dan pemungutan retribusi daerah.
- k) Melaksanakan fasilitasi pelayanan unggulan (SAMSAT).
- l) Melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

m) Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang –undangan.

n) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan,

o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Melakukan administrasi ketatausahaan, koodinasi dan pengendalian, monitoring, dan evaluasi, dan pengukuran kinerja lingkup UPTD pada Dinas Pendapatan Daerah serta penyusunan laporan. Kepala Sub bagian tata usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan sub bagian tatausaha sebagi pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian tata usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
4. Menyusun rancangan mengoreksi ,memaraf dan atau menandatangani naskah dinas.
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Melakukan kordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehngga terwujud kordinasi ,sinkronisasi dan integrasi pelkasaan kegiatan.

7. Melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT.
 8. Mengkordinasikan dan melakukan pengolahan data ,penyajian data dan informasi.
 9. Mengkordinasikan dan melakukan pelayanan administarsi umum.
 10. Mengkordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum.
 11. Mengkordinasikan dan melakukan pelayanan administarsi keuangan.
 12. Mengkordinasikan dan melakukan pelayanan ketata usahaan.
 13. Mengkordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tata laksana.
 14. Mengkordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan.
 15. Melakukan kordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
 16. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan praturan perundang –undangan.
 17. Menyusun hasil laporan pelaksanaan tugass kepala sub bagian tata usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan,
 18. Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- c. Seksi Penetapan dan Penerimaan

Seksi penetapan dan penerimaan di pimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas membantu kepala UPT dalam melakukan pelayanan tehnis

penunjang penetapan dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Dengan uraian tugas meliputi (ayat 1).

- a) Menyusun rencana kegiatan seksi penetapan dan penerimaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
- c) Memantau dan mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi penetapan dan penerimaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf atau dengan menanda tangani naskah dinas.
- e) Mengikuti rapat –rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- f) Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan teknis pelayanan dan penetapan.
- g) Melakukan teknis penetapan dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- h) Melakukan pembinaan teknis penetapan dan penerimaan pajak daerah dan etribusi daerah.
- i) Melakukan penyelenggaraan kegiatan perhitungan, penelitian ,verifikasi dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
- j) Melakukan penerbitan surat ketetapan pajak daeran dan surat ketetapan retribusi daerah.
- k) Melakukan penyampaian surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah.

- l) Melakukan pelayanan melalui pengoperasian sistem pengelolaan data elektronik.
 - m) Melakukan layanan unggulan Samsat.
 - n) Melakukan penata usahaan, penerimaan, penyetoran, pembukuan dan pembuatan laporan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - o) Melakukan pemantauan pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis penetapan dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - p) Melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - q) Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang –undangan.
 - r) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi penetapan dan penerimaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
 - s) Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- d. Kepala seksi pendataan dan penetapan

Melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang pendataan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya. Adapun dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, kepala seksi pendataan dan penetapan mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1. Menyampaikan surat ketetapan kepada wajib pajak dan retribusi.

2. Menyelenggarakan inventarisasi data potensi obyek dan subyek pajak daerah, penetapan dan penginventarisasian wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu.
 3. Membuat laporan hasil pendataan dan penetapan setiap bulannya.
- e. Seksi penagihan dan penerimaan dan penerimaan. Yang dimaksud dalam tugas pokok seksi penagihan dan penerimaan sebagai berikut.
1. Melaksanakan penagihan dan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
 2. Menyiapkan surat penagihan dan surat tegur terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu.
 3. Membuat laporan pelaksanaan penagihan dan penerimaan setiap bulannya.
 4. Melaksanakan tugas operasional pemeriksaan pelunasan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) di jalan raya bekerja sama dengan instansi terkait.

Samsat Luwu Utara sebagai suatu organisasi merupakan suatu kesatuan kerja yang dikordinasikan secara sadar, dengan suatu batasan relatif jelas, yang berfungsi secara teratur dalam rangka mencapai suatu tujuan. Pengelompokan orang-orang tersebut di dasarkan kepada prinsip-prinsip pembagian kerja, peranan dan fungsi, hubungan, prosedur, aturan, standar kerja, tanggung jawab, dan otoritas tertentu. Wujud pengelompokan tersebut dapat diamati dari struktur dan hirarki, karena itu menyusun suatu struktur sering didefinisikan dengan membuat desain organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4.1.5. Sumber Daya Manusia Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten

Luwu Utara

Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara memiliki sumber daya manusia yang berjumlah 40 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai kontrak. Adapun sumberdaya manusia pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut.

TABEL 4.1
DATA PEGAWAI KANTOR BERSAMA SAMSAT MASAMBA
KABUPATEN LUWU UTARA

No	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan IV/c	-
2	Golongan IV/b	1
3	Golongan IV/a	2
4	Golongan III/d	8
5	Golongan III/c	11
6	Golongan III/b	7
7	Golongan III/a	2
8	Golongan II/d	-
9	Golongan II/c	1
10	Golongan II/b	1
11	Golongan II/a	3
13	Golongan I/d	-
14	Golongan I/c	-
15	Golongan I/b	-
16	Golongan I/a	-
Jumlah		36

Sumber : Kasubbag Tata Usaha Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara

4.2. Deskripsi Data

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara, peneliti dapat memberikan hasil mengenai Kinerja Keuangan Pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara yang didasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana pada pasal 4 bagian ketiga Azas Umum Pengelolaan Daerah ayat (1) menyatakan bahwa “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperlihatkan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.” Dimana hal ini sejalan dengan prinsip Pengevaluasian Kinerja Keuangan yaitu adanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran.

Adapun untuk mengetahui pengelolaan manajemen keuangan pada kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada para narasumber yang terdiri dari Kepala UPT Pendapatan, Kasubbag Tata Usaha, dan Pengawas Pelaporan Transaksi Keuangan.

1. Jika dilihat dari pertanyaan terkait seperti apa kinerja pengelolaan manajemen keuangan pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara, peneliti melakukan wawancara kepada EA selaku Kepala UPT Pendapatan di Kantor Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara, yang dimana beliau menjawab bahwa:

“...Di sini kami, dalam pengelolaan uangnya sangat singkat, hampir tidak mengelola keuangan seperti di instansi atau perusahaan lain, karena uang yang masuk seperti uang pembayaran pajak kendaraan

yang masuk langsung masuk di bank hari itu juga, sesuai sistemnya uang tidak boleh bermalam...”(wawancara 23 Mei 2022)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pada Kantor Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara tidak mengelola uang pembayaran pajak kendaraan yang masuk. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara terhadap IS selaku Kasubag TU yang mengatakan bahwa:

“...Uang pembayaran pajak kendaraan masyarakat yang masuk akan dikelola langsung oleh Kasda atau Pemerintah Pusat kemudian mereka yang mengatur uang tersebut dan mengelolanya. Jadi kantor Samsat disini hanya menarik setoran pajak kendaraan ...”(wawancara 6 juni 2022)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa di kantor Samsat tersebut hanya melakukan penarikan setoran pajak kendaraan, dan setorannya dikelola langsung oleh Kas Daerah Pusat. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara terhadap NJ yang jabatannya sebagai Pengawas Pelaporan Transaksi Keuangan yang menjelaskan bahwa:

“...Di samsat sendiri, uang yang masuk seperti uang pembayaran pajak kendaraan sistemnya itu, wajib pajak datang membayar di kasir setelah itu uangnya langsung dilakukan pemungutan dari jam 9 sampai jam 3 sore oleh pihak bank sulselbar kemudian di transfer ke Kasda Provinsi Sulsel. (wawancara 31 mei 2022)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa dalam setiap hari pihak bank sulselbar melakukan pemungutan uang wajib pajak kendaraan yang masuk di kantor Samsat.

2. Jika dilihat dari pertanyaan mengenai evaluasi kinerja keuangan di Kantor

Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara, peneliti melakukan kegiatan wawancara kepada IS selaku Kasubbag TU yang menjawab bahwa:

“...Iya, disini ada evaluasi kinerja keuangannya, sistem evaluasi kinerja keuangannya disini kami langsung presentasi di pusat setiap per tiga bulan dan setiap akhir tahun...” (6 juni 2022)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara melakukan pengevaluasian setiap per tiga bula dan setiap akhir tahun di pusat. Peneliti juga melakukan wawancara kepada NJ yang jabatannya selaku Pengawas Pelaporan Transaksi Keuangan yang mengatakan bahwa:

“...Yang di presentasikan dalam evaluasi kinerja keuangan itu seperti jumlah penerimaan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), BBN (Biaya Balik Nama), Pajak Biaya Permukaan, dan Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Luwu Utara, dan juga Laporan setiap kegiatan yang diadakan, itu semua dilaporkan pada saat akhir tahun dan per tiga bulan sekali...” (wawancara 31 mei 2022)

Berdasarkan wawancara NJ dapat dikatakan bahwa pada saat akhir tahun dan per tiga bulan semua pelaporan akan dievaluasi. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan EA sebagai Kepala UPT Pendapatan bahwa:

“...Menurut saya tidak ada hambatan yah, karena sejauh ini orang-orang dikeuangan selalu tepat waktu melalukan pelaporan dan walaupun dilakukan evaluasi semuanya aman, tidak ditemukan temuan...”(wawancara 23 mei 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada hambatan dalam keuangan karena tidak pernah ditemukan adanya temuan-

temuan yang bersifat menyimpang, dapat dikatakan bahwa ada atau tidak adanya faktor penghambat, transparansi harus tetap dilakukan karena merupakan hal yang sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan.

3. Selanjutnya untuk mengetahui pengelolaan manajemen keuangan pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara juga dapat diketahui jika melihat pada indikator akuntabilitas dan transparansi, adapun pertanyaannya terkait seperti apa akuntabilitas pengelolaan manajemen keuangan pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi aparatur negara ataupun pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang diterapkannya. Berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, aparatur negara harus menerapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing secara jelas dan selaras dengan visi, misi, dan tujuan instansi.

Berdasarkan pada indikator tersebut, terdapat beberapa pertanyaan wawancara yang diajukan peneliti kepada para narasumber yang terdiri dari Kepala UPT Pendapatan, Kasubbag Tata Usaha, dan Pengawas Pelaporan Transaksi Keuangan.

Jika melihat pada indikator akuntabilitas pertanyaan terkait seperti apa akuntabilitas pengelolaan manajemen keuangan pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara, peneliti melakukan kegiatan wawancara kepada EA selaku Kepala UPT Pendapatan Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara yang dimana beliau menjawab bahwa:

“...Akuntabilitas pastinya vertikal, secara kedinasan kita bertanggung jawab kepada atasan dalam hal ini pusat dimana pertanggungjawaban itu kita laporkan dan diperiksa setiap tiga bulan sekali oleh inspektorat di pusat tetapi sebenarnya secara tersirat kita bertanggung jawab kepada masyarakat...”(wawancara 23 mei 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa akuntabilitas pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Luwu Utara dilakukan secara vertikal dalam artian bertanggung jawab kepada atasan di pusat dalam bentuk pelaporan dan pemeriksaan yang dilakukan setiap tahun oleh inspektorat di pusat. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap NJ sebagai Pengawas Pelaporan Transaksi Keuangan yang mengatakan bahwa:

“...Kalau akuntabilitasnya kita langsung bertanggung jawab kepada pusat, tetapi sebelumnya laporan itu kami masukkan ke laporan PAD nanti dari sana baru diteruskan...”(wawancara 31 mei 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara langsung kepada pusat. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada IS sebagai Kasubbag TU yang mengatakan bahwa:

“...Kalau kami sendiri ada laporan setiap kegiatan kepada atasan yaitu Kepala UPT Pendapatan Kantor, laporan mingguan maupun laporan setiap bulan, nantinya laporan itu yang akan dievaluasi di pusat, kemudian kalau kami akuntabilitas keuangannya jika ada kegiatan dilapangan, jadi paling kami membuat laporan terkait penggunaan dana itu, itupun laporan per kegiatan mau itu setiap minggu atau bulan intinya kalau kami dilapangan semua harus dilaporkan dan harus ada buktinya...”(wawancara 6 juni 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa akan melakukan pelaporan atas setiap kegiatan kepada Kepala UPT Pendapatan Kantor baik itu laporan mingguan ataupun laporan bulanan dilakukan setiap ada kegiatan di lapangan yang akan dievaluasi.

Berdasarkan indikator akuntabilitas terkait bentuk tanggung jawab kerja yang dilakukan oleh pegawai dalam melakukan pengelolaan manajemen keuangan pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara, peneliti melakukan wawancara terhadap EA selaku Kepala UPT Pendapatan Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara:

“...Kami disini ada pembendaharaan, kami bertanggung jawab atas dana yang masuk dan kami kan juga ada absensi kegiatan per harinya...”(wawancara 23 mei 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara adalah dalam bentuk penerimaan dan penggunaan keuangan terhadap masing-masing bidang disemua kegiatan. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap IS sebagai Kasubbag TU yang mengatakan bahwa:

“...Saya kira kemampuan pegawai keuangan sudah sangat bagus yah tugas-tugas mereka terselesaikan dengan baik, tidak diragukan lagi...”(wawancara 6 juni 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa kemampuan pegawai keuangan dalam mengelola manajemen keuangan sudah sangat baik hal ini terbukti dari pekerjaan mereka yang terselesaikan dengan baik dan dapat dikatakan kompeten, hal ini dapat dilihat dari kinerja mereka dan

keikutsertaan dalam berbagai pelatihan keuangan yang diadakan oleh Kementerian.

Terkait dengan indikator akuntabilitas tentang pentingnya penerapan akuntabilitas terhadap keuangan pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara, peneliti melakukan wawancara terhadap NJ sebagai Pengawas Pelaporan Transaksi Keuangan yang mengatakan bahwa:

“...Akuntabilitas itu sangat penting apalagi menyangkut tanggung jawab kami, dimana kami harus melakukan pelaporan keuangan yang transparan supaya kita bisa terhindar dari penyimpangan istilahnya khilaf...”(wawancara 31 mei 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan berhubungan dengan tanggung jawab pelaporan keuangan yang transparan sehingga hal ini sangat penting untuk diterapkan. Selain itu akuntabilitas penting dalam melaksanakan tanggung jawab kerja para pegawai, hal ini dimaksudkan agar pegawai dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

“...Kalau berbicara akuntabilitas, yah tentunya sangat penting untuk diterapkan apalagi untuk pengelolaan keuangan yang ada pelaporannya yang tidak bisa dipisahkan dari akuntabilitas, transparan, jujur...”(wawancara 23 mei 2022).

Berdasarkan wawancara EA sebagai Kepala UPT Pendapatan tersebut dapat dikatakan bahwa akuntabilitas dan pengelolaan keuangan adalah hal

yang tidak dapat terpisahkan, sama halnya dengan sikap transparan dan jujur dalam mengelola keuangan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terkait pentingnya penerapan akuntabilitas dapat dikatakan bahwa penerapan akuntabilitas sangat penting karena berhubungan dengan tanggung jawab kerja yang dilaksanakan. Dengan adanya akuntabilitas penyimpangan-penyimpangan dalam hal mengelola keuangan dapat diminimalisir selain itu juga untuk meningkatkan sikap jujur dalam diri pegawai.

4. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersifat transparan atau terbuka terhadap rakyatnya, baik itu di tingkat pusat maupun daerah. Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, dan pengelolaan keuangan, tetapi tidak serta merta prinsip ini hanya berfokus pada keuangan saja namun juga pada hal lainnya yang menyangkut keberlangsungan hidup perusahaan ataupun instansi. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain dapat mengetahui keadaan perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Untuk menjaga obyektivitas, maka haruslah tersedia informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh orang lain.

Berdasarkan pada indikator tersebut, terdapat pertanyaan wawancara yang diajukan peneliti kepada para narasumber yang terdiri Kepala UPT Pendapatan, Kasubbag TU, dan Pengawas Pelaporan Transaksi Keuangan

Berdasarkan indikator transparansi tentang bagaimana transparansi manajemen keuangan pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara ini, peneliti melakukan wawancara terhadap EA selaku Kepala UPT Pendapatan, beliau mengatakan bahwa:

“...Transparansi itu sangat penting, disini kami keterbukaannya jelas karena semua uraian pembelanjaan kegiatan dapat dilihat secara jelas oleh semua pihak...”(wawancara 23 mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa keterbukaan pengelolaan keuangan dapat dilihat secara jelas karena semuanya dapat dilihat pada uraian pembelanjaan kegiatan yang ada. Selanjutnya wawancara yang dilakukan kepada IS selaku Kasubbag TU mengatakan bahwa:

“...Semuanya jelas dan terbuka karena kami ada pelaporan dari setiap kegiatan terkait penggunaan anggaran baik itu tertulis maupun laporan langsung kepada pusat, selain memberikan bukti dokumentasi di setiap kegiatan yang merupakan hal wajib kami sertakan kami juga ada pelaporan tertulis terkait kegiatan kami di lapangan karena nantinya itu akan di evaluasi”(wawancara 6 juni 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa keterbukaan atau transparansinya jelas dan terbuka karena adanya pelaporan dari setiap kegiatan baik itu pelaporan secara tertulis maupun dilaporkan langsung kepada atasan, adanya pelaporan dari setiap kegiatan yang dilakukan di lapangan serta adanya bukti dokumentasi selain itu juga dilakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran di lapangan. Kemudian NJ sebagai Pengawas Pelaporan Transaksi Keuangan mengatakan bahwa:

“...Untuk transparansi sendiri disini tidak ada yang ditutupi karena semuanya dapat dilihat secara jelas. Kalau masalah sistem transparannya itu seperti ini, jadi uang pajak yang masuk disini sampai di kantor pusat dikembalikan di kasda provinsi, kemudian kasda provinsi membagi hasil ke pemda, seperti uang yang masuk di luwu utara ada sekitar 40% sesuai sistem bagi hasilnya, kemudian sisanya dikelola oleh pemprov seperti gaji, belanja modal (pembangunan, uang jalan, dan sekolah-sekolah)...” (wawancara 31 mei 2022)

Berdasarkan wawancara mengenai indikator transparansi pengelolaan manajemen keuangan pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara dapat diatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan dapat dilihat pada laporan keuangan setiap pembelanjaan ataupun kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, dapat dilihat pada evaluasi yang dilakukan setiap 3 bulan dan setiap akhir tahun dimana evaluasi ini dilakukan oleh inspektorat selaku pengawas.

5. Pertanyaan mengenai transparansi instansi dalam hal berbagi informasi yang luas serta mudah kepada masyarakat terkait pengelolaan manajemen keuangan pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara, peneliti melakukan wawancara kepada NJ yang menjabat sebagai Pengawas Pelaporan Transaksi Keuangan yang mengatakan bahwa:

“...Kami sendiri memberikan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan yang kami lakukan melalui akun media sosial kami sendiri yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, kami ada facebook dan instagram yang didalamnya berisi kegiatan-kegiatan kami tetapi untuk memberikan informasi terkait laporan keuangan kami itu tidak

dapat dilakukan tentunya karena ada beberapa aturan yang harus dipatuhi...”(wawancara 31 mei 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara dengan mudah dan luas berbagi informasi kepada masyarakat melalui akun media sosial berupa facebook dan instagram. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap EA sebagai Kepala UPT Pendapatan bahwa:

“...Sekarang kan sudah jaman serba digital jadi kami juga tentunya tidak ingin ketinggalan berbagi informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan kami, itu semua dapat dilihat di facebook dan instagram Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara yang selalu *update* dalam memberikan informasi....”(wawancara 23 mei 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pemanfaatan media digital digunakan untuk berbagi informasi dengan mudah kepada masyarakat. Kemudian EA sebagai Kepala UPT Pendapatan melanjutkan bahwa:

“...Setiap kegiatan ataupun pembaruan pelayanan selalu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, apalagi sekarang sudah serba teknologi jadi informasi-informasi itu mudah untuk dibagikan kepada masyarakat melalui media *online*...”(wawancara 23 mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pemberian informasi kepada masyarakat dilakukan dengan perantara media *online* di era digital ini. Peneliti lalu melakukan wawancara terhadap IS sebagai Kasubbag TU yang mengatakan bahwa:

“...Kalau untuk pemberian informasinya sangat bagus karena memang ada yang bertugas untuk meng*update* di facebook seruluh kegiatan baik itu rapat-rapat maupun kegiatan di lapangan...”(wawancara 6 juni 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pemberian informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan di Kantor Samsat sangat bagus karena adanya orang yang bertugas untuk selalu melakukan *update* informasi. Peneliti juga melaukan wawancara terhadap NJ sebagai Pengawas Pelaporan Transaksi Keuangan yang mengatakan bahwa:

“...Seluruh kegiatan kami dapat dilihat di facebook dan Instagram Kantor Samsat, jadi kalau masyarakat mau tahu kegiatan kami itu sangat mudah...”(wawancara 31 mei 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa bagi masyarakat yang ingin mengetahui segala kegiatan di Kantor Samsat dapat dilihat di akun facebook Kantor Samsat Luwu Utara.

Berdasarkan wawancara terkait indikator transparansi tentang penerapan transparansi instansi dalam memberikan akses informai yang luas secara mudah kepada masyarakat dapat dikatakan bahwa penyebaran informasinya sangat bagus. Segala hal tentang pembaruan informasi pelayanan publik, kegiatan program kerja dan lain sebagainya dapat dilihat pada akun media sosial Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara khususnya facebook dan instagram.

6. Pertanyaan selanjutnya tentang seberapa penting penerapan transparansi terhadap manajemen keuangan pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara, peneliti melakukan wawancara kepada EA sebagai UPT Pendapatan yang mengatakan bahwa:

“...Tentunya transparansi itu penting sekali, apalagi kami yang berada di pemerintahan tentunya harus transparan kepada masyarakat karena tanggung jawab kita kepada masyarakat sangat besar, terkait dengan pengelolaan keuangan kami tentunya selalu dilakukan evaluasi ataupun monev baik yang dilakukan oleh Pusat...”(wawancara 23 mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa transparansi sangat penting karena terkait dengan tanggung jawab kepada masyarakat, tetapi untuk pengelolaan manajemen keuangan belum transparan kepada masyarakat tetapi selalu adanya evaluasi atau monev yang dilakukan oleh Pusat. Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara kepada NJ sebagai Pengawas Pelaporan Transaksi Keuangan yang mengatakan bahwa:

“...Transparansi itu sangat penting karena menyangkut kepercayaan masyarakat. Semua anggaran yang berasal dari pajak pembayaran kendaraan makanya semua itu harus jelas bahwa dana tersebut langsung masuk di bank, transparansi ini sama pentingnya dengan akuntabilitas...”(wawancara 31 mei 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa transparansi sangat penting karena menyangkut kepercayaan kepada masyarakat dan anggaran yang berasal dari pajak pembayaran masyarakat. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada IS sebagai Kasubbag TU yang mengatakan bahwa:

“...Tentunya transparansi itu harus dan sangat penting supaya kita tau tentang anggaran, keluar masuknya dana, keterbukaan sangat penting dilakukan, apalagi anggaran yang berasal dari pajak tentunya perlu dilakukan evaluasi terhadap anggaran maupun kinerjanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu transparansi sangat penting dan dibutuhkan dalam hal pengelolaan keuangan, hal yang menyangkut keuangan adalah sesuatu yang sangat sensitive sehingga perlu adanya evaluasi biasanya dilakukan oleh pusat...”(wawancara 6 juni 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa transparansi harus dilakukan dan sangat penting untuk mengetahui penggunaan anggaran. Kemudian keterbukaan atau transparansi sangat penting sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk menghindari tindakan penyimpangan penggunaan dana. Kemudian transparansi keuangan sangat penting untuk dilakukan dan dibutuhkan untuk mengelola keuangan, evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat tentunya untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

Berdasarkan wawancara terkait indikator transparansi tentang seberapa penting transparansi terhadap pengelolaan manajemen keuangan pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara dapat dikatakan sangat penting hal ini karena menyangkut pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait bagaimana anggaran yang berasal dari pajak pembayaran kendaraan masyarakat.

7. Berdasarkan indikator transparansi tentang faktor penghambat dalam penerapan transparansi terhadap manajemen keuangan pada Kantor Bersama

Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara, peneliti melakukan wawancara terhadap EA sebagai Kepala UPT Pendapatan yang mengatakan bahwa:

“...Hambatan pastinya ada dalam pengelolaan keuangan, biasanya adanya pelaksanaan kegiatan yang molor sehingga menghambat pelaporan keuangan tetapi untuk transparansi sendiri saya rasa tidak ada hambatan, tidak ada yang harus ditutupi...”(wawancara 23 mei 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa hambatan yang ada biasanya karena adanya pelaksanaan kegiatan yang diundur dengan alasan tertentu sehingga menghambat pelaporan keuangan, tetapi secara keseluruhan untuk penerapan transparansi tidak ada masalah. Peneliti juga melakukan wawancara kepada NJ sebagai Pengawas Pelaporan Transaksi Keuangan yang mengatakan bahwa:

“...Setiap bidang pekerjaan pasti ada hambatannya tetapi bagaimana cara kita menghadapi hambatan itu agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik dan bertanggung jawab...”(wawancara 31 mei 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa meskipun ada hambatan tetapi tentunya dilakukan berbagai upaya agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan tentang indikator transparansi tentang faktor penghambat dalam penerapan transparansi terhadap pengelolaan manajemen keuangan pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara dapat dikatakan bahwa sejauh ini tidak ada hambatan untuk terbuka dalam melakukan pelaporan keuangan, hal ini dikarenakan

semua bertanggung jawab terhadap pekerjaan mereka tanpa ada yang ditutupi sehingga saat dilakukan audit semuanya dapat dilihat dan dipertanggungjawabkan.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Pengelolaan kinerja keuangan pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan pelaksanaannya pun telah dilakukan dengan baik, hal ini dapat dilihat pada pembahasan dibawah ini.

1. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya terhadap tiga narasumber berbeda pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara tentang kinerja keuangan, dapat dikatakan bahwa di Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara pengelolaan keuangannya sangat singkat karena Kantor Samsat tersebut hanya menarik setoran pajak kendaraan, jadi uang pembayaran pajak kendaraan masyarakat yang masuk uangnya langsung dilakukan pemungutan dari jam 9 sampai jam 3 sore oleh pihak Bank Sulselbar kemudian di transfer ke Kasda Provinsi Sulsel, kemudian akan dikelola langsung oleh Kasda atau Pemerintah Pusat kemudian mereka yang mengatur uang tersebut dan mengelolanya. Kemudian uang pajak yang sampai di kantor pusat dikembalikan di Kasda Provinsi, kemudian Kasda provinsi membagi hasil ke Pemda, seperti uang yang masuk di Luwu Utara ada sekitar 40% sesuai sistem bagi hasilnya, kemudian sisanya dikelola

oleh Pemprov seperti gaji, belanja modal (pembangunan, uang jalan, dan sekolah-sekolah).

2. Jadi berdasarkan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya tentang Evaluasi Kinerja Keuangan pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara maka dapat disimpulkan bahwa pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara sistem evaluasinya dilakukan sebanyak dua kali, setiap satu kali dalam tiga bulan dan setiap akhir tahun. Dalam kegiatan pengevaluasian ini kantor samsat mempresentasikan pengelolaan dan pelaporan manajemen keuangan setiap satu kali dalam tiga bulan dan setiap akhir tahun, sistem evaluasi kinerja keuangan Kantor Samsat langsung di pusat dalam hal ini yaitu Kasda Provinsi. Adapun yang di presentasikan dalam evaluasi kinerja keuangan itu seperti jumlah penerimaan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), BBN (Biaya Balik Nama), Pajak Biaya Permukaan, dan Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Luwu Utara, dan juga Laporan setiap kegiatan yang diadakan, itu semua dilaporkan pada saat akhir tahun dan per tiga bulan sekali, serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
3. Tentang akuntabilitas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara dilakukan secara vertikal dimana dalam hal ini dilakukan pertanggungjawaban langsung kepada pusat, untuk laporan keuangan kegiatan pada masing-masing bidang, akuntabilitasnya diserahkan pada bagian keuangan untuk selanjutnya dievaluasi di pusat. Mengenai bentuk tanggung jawab kerja yang dilakukan oleh pegawai

Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara dalam melakukan pengelolaan manajemen keuangan maka bentuk tanggung jawab kerjanya adalah dengan membuat laporan terhadap semua kegiatan. Sedangkan untuk kemampuan pegawai Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara dalam melakukan pengelolaan keuangan sudah sangat baik dan kompeten, hal ini dapat dilihat dari kinerja mereka dan keikutsertaan dalam berbagai pelatihan keuangan yang diadakan oleh kementerian. Untuk seberapa penting penerapan akuntabilitas terhadap pengelolaan manajemen keuangan pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara maka penerapan akuntabilitas sangat penting untuk dilakukan karena berhubungan dengan tanggung jawab kerja yang dilaksanakan, sehingga dengan adanya akuntabilitas penyimpangan-penyimpangan dalam mengelola keuangan dapat diminimalisir selain itu juga dapat meningkatkan sikap jujur dan tanggung jawab pegawai dalam bekerja.

4. Jadi, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terkait tentang transparansi secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa penerapan transparansi pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada laporan keuangan dan evaluasi terhadap semua penggunaan anggaran dalam kegiatan, baik itu kegiatan lapangan, maupun program lain. Adapun evaluasi keseluruhan dilakukan baik dalam kurun waktu per tiga bulan ataupun tiap akhir tahun baik dilakukan oleh Pusat. Terkait dengan transparansi yang dilakukan Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara dalam hal memberikan akses informasi yang luas secara mudah kepada masyarakat

dapat dilihat pada website maupun akun media sosial Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara terutama *facebook* yang didalamnya memuat berbagai hal tentang Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara, baik itu kegiatan lapangan ataupun pembaruan informasi pelayanan masyarakat, tetapi untuk transparansi keuangan secara keseluruhan tidak dapat diakses oleh masyarakat karena adanya beberapa peraturan yang mengikat. Untuk pentingnya penerapan transparansi terhadap pengelolaan manajemen keuangan pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara dinilai sangat penting karena hal ini menyangkut tanggung jawab sebagai aparatur negara menyangkut kepercayaan masyarakat, karena dimana anggaran yang diperoleh untuk semua kegiatan berasal dari pajak masyarakat tentunya selain itu juga untuk menghindari dan mencegah adanya tindakan-tindakan menyimpang seperti korupsi. Serta untuk hambatan dalam hal penerapan transparansi dinilai tidak ada hambatan karena tidak ada yang perlu ditutupi. Semuanya tertera secara jelas dalam laporan keuangan yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi.

5. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Faisal Reza Nasution (2014) dengan judul penelitian Evaluasi Kinerja Keuangan Kantor SAMSAT Dalam Pelayanan Wajib Pajak Kendaraan Sumatra Utara. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Samsat hanya menarik setoran wajib pajak kendaraan, walaupun demikian, Kantor Samsat tetap di audit dan diadakan pengevaluasian kinerja keuangan setiap akhir

tahun, yang juga dilakukan oleh pusat dimana dalam hal ini adalah Kasda Pemprov.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Melihat dari hasil wawancara secara keseluruhan terhadap tiga narasumber yang berbeda pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara terkait dengan judul penelitian “Evaluasi Kinerja Keuangan Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara” maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya terhadap tiga narasumber berbeda pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara tentang kinerja keuangan, pengelolaan keuangannya sangat singkat karena kantor samsat tersebut hanya menarik setoran pajak kendaraan, kemudian akan dikelola langsung oleh Kas Daerah Pemrov.
2. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya tentang evaluasi kinerja keuangan pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara maka dapat disimpulkan bahwa pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara sistem evaluasinya dilakukan sebanyak dua. Kegiatan pengevaluasian ini kantor samsat mempresentasikan pengelolaan dan pelaporan manajemen keuangan setiap satu kali dalam tiga bulan dan setiap akhir tahun, langsung oleh Kas Daerah Provinsi.
3. Penerapan akuntabilitas pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat pada pertanggung jawaban kerja yang langsung dilaporkan kepada pusat dalam hal ini Pemrov

Sulsel, adanya laporan pertanggung jawaban dari penggunaan setiap anggaran kegiatan yang digunakan menjadi salah satu bentuk tanggung jawab kerja pegawai. Selain itu dengan dilakukannya evaluasi ataupun audit oleh inspektorat menjadi salah satu bukti bahwa penerapan akuntabilitas pada pengelolaan manajemen keuangan dapat dipertanggungjawabkan kedepannya.

4. Penerapan transparansi pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara belum terbuka kepada masyarakat umum terkait dengan pengelolaan keuangan, hal ini dikarenakan adanya aturan yang mengikat. Tetapi meskipun demikian, transparansi informasi sudah dilakukan dengan sangat baik, hal ini terbukti dengan mudahnya masyarakat dapat mengakses informasi-informasi terbaru pada website dan akun sosial media Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara.

5.2. Saran

Adapun saran dari penulis kepada pihak Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut.

1. Untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara, pegawai dan staf keuangan secara rutin mengikuti pelatihan-pelatihan keuangan agar pengelolaan keuangan menjadi lebih baik lagi kedepannya.
2. Ada baiknya jika sedikit transparan kepada masyarakat umum terkait dengan bagaimana kinerja pengelolaan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Zainul Arifin. 2018. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta. Zahir Publishing

A Irfandi. 2018. *Analisis Kinerja Pegawai UPTD Samsat Dalam Memberikan Pelayanan Publik Di Kota Makassar*. Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar

Andri Prasetyo. 2010. *Analisis Kinerja UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Cimahi*. Bandung. Universitas Komputer Indonesia

Darmawan. 2020. *Dasar-Dasar Memahami Rasio dan Laporan Keuangan*. Yogyakarta. UNY Press

Dian Annisa. 2011. *Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makassar Melalui Pendekatan Value For Money*. Makassar. Universitas Hasanuddin

Diana Widhi Rachmawati. 2017. *Evaluasi Kinerja Keuangan PT Pupuk Sriwijaya Dilihat Dari Rasio Likuiditas*. Palembang. Vol.17 No.3 Desember 2017

Fadhallah, R.A. 2020. *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ Press

Faisal Reza Nasution. 2014. *Evaluasi Kinerja Keuangan Kantor SAMSAT Dalam Pelayanan Wajib Pajak Kendaraan Sumatra Utara*. Medan. Universitas Medan Area

Febriana, Hadijah dkk. 2021. *Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan*.

<https://bapelitbangda.batam.go.id/arsip/783#:~:text=PP%20No.%2012%20Tahun%202019%20tentang%20Pengelolaan%20Keuangan,Pemerintahan%20Daerah%20yang%20menyatakan%20sebagai%20berikut%3A%20Pasal%20293> (Diakses pada tanggal 23 Februari 2022)

<https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/04/04/yuk-mengenal-samsat/> (diakses pada tanggal 23 Februari 2022)

<https://cekpajak.com/samsat-pkb/sulawesi-selatan/kabupaten-luwu-utara> (diakses pada 15 Juni 2022)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja>, (Diunduh pada tanggal 23 Februari 2022)

<https://m.facebook.com/SamsatLuwuUtara/>

Indah Lestari. 2017. *Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Palembang)*. Skripsi Universitas Brawijaya

Irnawati, Jeni dkk. 2021. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Bandung. CV Media Sains Indonesia

Marsel Pongoh. 2013. *Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan PT. Bumi Resources TBK*. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 September 2013, Hal. 669-679

Musthafa. 2017. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Andi

Nurdiansyah, Haris dan Robbi Saepul Rahman. 2019. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta. Diandra Kreatif

Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak

Susanti, Siwi dan Bambang Sugeng Dwiyanto. 2016. *Evaluasi Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kantor Pengelolaan Taman Pintar Yogyakarta Tahun 2011-2015*. Jurnal MAKSIPRENEUR, Vol. VI, No. 1, Desember 2016, hal. 55-56

Yuesti, Anik dan Putu Kepramaremi. 2019. *Manajemen Keuangan Jendela Pengelolaan Bisnis*. Bali: Noah Alethia

Toto Prihadi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama

L



A

M

P

I

R

A

N

**EVALUASI KINERJA KEUANGAN KANTOR BERSAMA SAMSAT
MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA**

Teknik Pengumpulan Data:

1. Wawancara
2. Metode penelitian lapangan (*Field Research*)
3. Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Informan Penelitian

No	Unsur Informan
1	Kepala UPT Pendapatan
2	Kasubbag Tata Usaha
3	Pengawas Pelaporan Transaksi Keuangan

Daftar Pertanyaan:

1. Seperti apa pengelolaan kinerja keuangan yang dilakukan oleh Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana sistem evaluasi pengelolaan kinerja keuangan pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara?
3. Seperti apa akuntabilitas pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara terhadap pengelolaan kinerja keuangan?
4. Seberapa penting akuntabilitas terhadap pengelolaan manajemen keuangan pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara?

5. Seperti apa transparansi yang dilakukan oleh Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara terhadap pengelolaan manajemen keuangan?
6. Bagaimana penerapan transparansi instansi Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara dalam memberikan akses informasi yang luas secara mudah?
7. Seberapa penting transparansi terhadap pengelolaan manajemen keuangan pada Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara?
8. Bagaimana kemampuan pegawai Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara dalam melakukan pengelolaan keuangan?

BOSOWA



Gambar 1 Proses Wawancara



Gambar 2 Kantor Bersama Samsat Masamba Kabupaten Luwu Utara

